

DESAIN PERENCANAAN TEKNOKRATIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER NILAI-NILAI ISLAM KE-INDONESIA-AN

Dwi Fitri Wiyono¹, Rosichin Mansur² Fahrudin Ar Rozi³
Alfirnando Febrian⁴

Universitas Islam Malang¹, Universitas Islam Malang²
Universitas Islam Malang³ Universitas Islam Malang⁴

e-mail: ¹dwi.fitri@unisma.ac.id ²rosichin.mansur@unisma.ac.id
³22001015026@unisma.ac.id, ⁴22001015030@unisma.ac.id

Abstrak

Problematika mendasar pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an disebabkan belum adanya konsep dan desain perencanaan teknokratik dalam rumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Narasi tersebut menunjukan lemahnya argumentasi pemikiran pendidikan Islam dalam kajian desain perencanaan teknokratik yang memungkinkan adanya proses integrasi nilai-nilai Islam didalam konsep dan desain kebijakan kurikulum pendidikan nasional berdasarkan ideologi dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan utama penelitian adalah bagaimana konsep dan proses formulasi perencanaan teknokratik kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an. Tujuan penelitian adalah menemukan konsep dan formulasi perencanaan teknokratik kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, proses pengumpulan data menggunakan kajian literatur dan dokumen *official*. Kajian literatur, dokumen *official* dan data dianalisis secara simultan melalui penarikan gagasan kebijakan yang menghasilkan desain perumusan *policy brief* arah tujuan pendidikan Islam dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan integrasi konsep value Islam Ke-Indonesia-an dalam formulasi perencanaan teknokratik kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an, melalui desain kebijakan yang dimulai dengan analisis konteks makro dan mikro pendidikan karakter, integrasi nilai-nilai Islam dengan kerangka visi misi dan tahapan prioritas pembangunan karakter bangsa, pilihan sasaran dan pengendalian strategi nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an dalam struktur wilayah dan kurikulum satuan pendidikan Islam.

Kata kunci: *Perencanaan teknokratik, kebijakan pendidikan Islam, karakter Islam Ke-Indonesia-an*

Abstract

The fundamental problem of character education of Indonesian Islamic values is due to the lack of concept and design of technocratic planning in the formulation of Islamic education policy in Indonesia. This fact shows the weak argument of Islamic education thinking in the study of technocratic planning design that allows the process of integration of Islamic values in the concept and design of national education curriculum policy based on the ideology and philosophy of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The main question of research is how the concept and formulation process of technocratic planning policy character education values of Indonesian Islam. The purpose of the research was to find the concept and formulation of technocratic planning policy on character education of Indonesian Islamic values. This research method uses qualitative approach, data collection process using literature review and official documents. Literature studies, official documents and data are analyzed simultaneously through the withdrawal of policy ideas that produce the design of policy brief formulation of islamic education objectives and conclusions. The results of this study found the integration of the concept of Indonesian Islamic values in the formulation of technocratic planning policy on character education of Indonesian Islamic values, through policy design that begins with the analysis of macro and micro context of character education, integration of Islamic values with the framework of mission vision and priority stages of nation character development, target choice and control of strategies of Indonesian Islamic values in the regional structure and curriculum of Islamic education units.

Key words: *Technocratic planning, Islamic education policy, The Character of Indonesian Islam .*

PENDAHULUAN

Problematika pendidikan Islam di Indonesia yang dihadapi saat ini merupakan dimensi konsep dan format baku (*blue print*) yang menjadi rujukan birokratik pendidikan Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islam kebangsaan atau Ke-Indonesia-an, khususnya di tiga Kementerian, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kondisi tersebut juga menjadi masalah urgen bagi negara yang berpenduduk terbanyak umat Islam, khususnya di wilayah timur tengah. Kenyataan ini menunjukkan lemahnya nalar akademik pendidikan Islam terutama dalam menterjemahkan pemikirannya dari sisi aspek birokrat-teknokratik berdasarkan nilai-nilai filosofi kebangsaan (*nation state*), akibatnya, refrensi untuk pengembangan keilmuan pendidikan Islam di level bawah belum memiliki acuan baku maupun standart yang memungkinkan adanya proses internalisasi nilai-nilai maupun ideologi didalam suatu Negara terumuskan secara doktrinal didalam konsep desain kurikulum dan menjadi rujukan dalam system kehidupan berbangsa dan bernegara dibidang Pendidikan Islam.

Karakter Nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an merupakan hal penting untuk dirumuskan secara integratif khususnya dalam desain perencanaan infrastruktur kebijakan makro sehingga landasan pembangunan karakter lebih komprehensif antar lembaga kementerian dan non parsial sehingga penanaman karakter nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an terutama dalam pembangunan sumber daya manusia berjalan sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia. Sedangkan kebijakan secara mikro dalam lingkup satuan pendidikan sekolah dan atau madrasah perlu untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu terutama karakter ke-Indonesiaan dalam desain kurikulum dan pembelajaran pendidikan Islam.

Salah satu pengaruh yang dominan dalam lemahnya pendidikan Islam di Indonesia adalah tidak adanya *political will* dari pemerintah dan kehadiran Negara penting untuk dimanifestasikan dalam sebuah kebijakan nasional sehingga mampu menstimulus perubahan sosial kearah terbentuknya suatu kondisi masyarakat multicultural yang dicita-citakan. Asumsi bahwa untuk mencapai kemajuan peradaban yang multicultural, solusi masalah tersebut adalah kebijakan strategis dari Negara. Berbagai kebijakan penting untuk diterjemahkan dalam dimensi teknokratik khususnya lembaga Pendidikan Islam.

Salah satu yang urgen adalah Kebijakan nasional dalam bidang pendidikan Islam yang disepakati sebagai nilai-nilai yang diakui oleh negara berdasarkan falsafah Pancasila. Sebagai suatu kesepakatan, kebijakan nasional pendidikan yang termaktub dalam tujuan pendidikan merupakan suatu doktrin yang tidak bisa

dilakukan rekonstruksi dan menjadi patokan yang dinamis di masa yang akan datang agar memberikan ruang kebebasan terhadap masyarakat dan warga yang terdidik (Tilaar, 2004:119).

Pendidikan lahir ditengan situasi yang merdeka perlu dikembangkan dalam konteks Ke-Indonesia-an, juga berfungsi untuk mencerdaskan individu, masyarakat, kebangsaan, dan dunia internasional. khususnya di Indonesia karena, Hal ini memiliki relevansi dengan konsep pendidikan karakter ke-Indonesia-an yang secara struktur demografis memiliki cakupan kultural dan multi etnis yang sangat kompleks, nilai-nilai karakter Islam Ke-Indonesia-an memiliki prinsip dan karakter yang tidak membedakan baik itu bahasa, etnis, kultur, budaya, ras, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Fungsi pendidikan sedikit disinggung pada bab II pasal 3 dalam Undang-Undang Sitem Pendidikan Nasional Tahun 2003, bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Tilaar, 2004: 183).

Pemerintah telah mengambil kebijakan dalam Undang-undang baru mengenai pendidikan nasional yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. dengan segala hal-hal yang positif dalam undang-undang tersebut, pengaturan mengenai keterkaitan antara dwfinisi dan konsep multikulturalisme pendidikan tidak begitu ditonjolkan di dalam undang-undang tersebut. Menurut Tilaar, hanya dalam Pasal 4 Ayat 1 disinggung mengenai problematika nilai-nilai kultural sebagai landasan dalam pembangunan pendidikan karakter dan salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Tilaar, 2004:134).

Penelitian ini penting dikaji secara teknokratik dan teoritik terutama untuk menjawab problem yuridis dalam pembangunan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an melalui formulasi dan desain perencanaan teknokratik dalam rumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

METODE

Metode dalam penulisan ini adalah *library research*, yaitu penulisan karya ilmiah yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data (Mestika Zed, 2008: 2). Penulis mengumpulkan berbagai produk kebijakan tentang konsep dan formulasi kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam kebangsaan dan Ke-Indonesia-an disetiap satuan lembaga pendidikan Islam, yang terintegrasi dalam pendidikan nasional berdasarkan ideologi dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hasil penelitian fokus pada kebijakan pengembangan kurikulum dan kelembagaan dilevel kebijakan makro dan mikro sebagai sumber utama maupun

berbagai karya tulis ilmiah lain sebagai data pendukung untuk mengungkap formulasi, implementasi, dan evaluasi perencanaan strategis Kebijakan pendidikan karakter sebagai kerangka dalam menjawab perencanaan teknokratik kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an. Penulis menggunakan berbagai literature.

Penulis menganalisis literatur teknokratik dari rujukan yang terkait dengan judul, Beberapa karya tulis, teori-teori dari buku bacaan, dan dokumen atau disebut sebagai data sekunder yang meliputi, buku, jurnal, artikel, dokumen kebijakan yang terkait dengan kebijakan pendidikan karakter, studi ke-Islam-an dan lain-lain sehingga, data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer dan data sekunder. Penulis menggunakan data-data dari dokumen peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan berbagai kajian dalam bentuk buku dan jurnal sebagai data sekunder untuk memberikan penajaman dalam merumuskan formulasi perencanaan teknokratik kebijakan pendidikan karakter Islam KE-Indonesia-an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep perencanaan berkembang berkaitan dengan tingkat perkembangan manusia, agar proses perencanaan dibutuhkan untuk mengetahui terjadinya kegagalan dalam usaha pemenuhan kebutuhan manusia. Mengingat kebutuhan manusia yang sangat kompleks, perencanaan menjadi ilmu yang tergolong multi disiplin, hal tersebut menyebabkan kecenderungan perencanaan direlasikan dengan aspek yang global seperti kesejahteraan, politik dan pendidikan.

Kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an perlu dibangun melalui proses perencanaan teknokratik dengan melibatkan seluruh *stakeholder* antar multisektor. Kebijakan makro oleh pemerintah dibuat secara bertahap dan dilandasi oleh kajian teoritis-empiris. Berikut ini konsep dan formulasi perencanaan teknokratik yang merupakan gagasan penulis dari refleksi kajian teoritis dan yuridis dalam mendesain pendidikan karakter nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an:

1. Perencanaan Teknokratik

Definisi perencanaan adalah relasi antara kondisi saat ini (*what is*) dengan kondisi yang dipastikan di masa yang akan datang (*what should be*) yang berhubungan dengan kebutuhan dasar untuk penentuan skala prioritas program, dan distribusi hasil perencanaan (Hamzah Uno: 2014:32). Proses perencanaan yang berdampak pada keputusan menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan diawali pada akhir abad ke-19 dan setelah perang dunia

kedua, fokusnya terletak pada aspek desain lingkungan fisik dan disebut sebagai *morphological conception of space* (James Friedmann, 1987L:21)

Secara historis epistemologi, bahwa proses perencanaan ini terjadi pada era tahun 60-an dan digambarkan oleh Taylor sebagai pergeseran besar menuju *sociological conception of space* (Nigel Taylor, 1998:34). Dimensi makro dari proses desain perencanaan menimbulkan respon yang abstrak atau normatif. Perencanaan di beberapa Negara Islam di Dunia, memiliki tradisi besar, yaitu: perencanaan secara ekonomi, manajemen, dan administrasi publik.

Berdasarkan narasi sejarah diatas bahwa dalam konteks teori perencanaan teknokrasi memiliki aspek multidimensi karena terkait dengan model kajian yang khas dari setiap teori perencanaan (Patsy Healey, 1997:61) Konsep dan praktik perencanaan awal pun, yaitu perencanaan aspek fisik lingkungan (*Orthogonal Design*) berbasiskan pada ilmu publik yang berkembang dan direspon pada awal abad 19. Menjelaskan tentang konsep perencanaan, hakikatnya menekankan pada aspek budaya dalam menjelaskan suatu perencanaan, sedangkan perencanaan menekankan berbagai aspek kehidupan strategis, contohnya adalah lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan. Perencanaan erat kaitannya dengan desain dan model kebijakan, kedua narasi diatas memiliki sejumlah perbedaan disebabkan karena perkembangan historis dari literatur dan bukan dalam arti yang melekat pada istilah (Mayer, Robert R. 1985, 71).

Sedangkan Islamy membagi proses perencanaan dalam beberapa tahap, yaitu: (a) perumusan masalah, (b) penyusunan agenda (*agenda setting*), (c) perumusan usulan, (d) pengesahan kebijakan, (d) pelaksanaan kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan (Islamy, 2003: 32).

2. Kebijakan Pendidikan Karakter

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017, tujuan pendidikan karakter adalah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dilaksanakan dengan menerapkan Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab (PP. Republik Indonesia, 2017:42)

Kebijakan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur,

toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab

Menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, Maka dunia pendidikan khususnya dalam kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia harus mempersiapkan untuk menghadapi tantangan globalisasi pada semua jenjang pendidikan Islam, yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan Islam yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat 3) untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat1).

Official based yang dimaksud diatas akan berfungsi memberikan pelayanan kepada siswa (pasal 53 ayat 2). Kesimpulannya adalah *Official Education Based* dalam dunia pendidikan akan memberikan landasan filosofis dan yuridis kepada penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan ini dilakukan agar pengawasan terhadap kelembagaan pendidikan formal terintegrasi dalam peraturan yang didesain oleh pemerintah terutama dalam penanaman nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an

3. Nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an

Pengaruh aktifitas dalam pendidikan memiliki peran strategis terutama dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Bahkan, dekadensi moral yang mempengaruhi akhlak manusia memiliki ketergantungan terhadap kontribusi pendidikan (Abudin Nata, 1996: 166). Kondisi diatas memiliki kesesuaian dengan tujuan dari pendidikan, salah satu diantaranya ialah menjadikan manusia sebagai insan kamil. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nahl ayat 78 di bawah ini:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُم مِّنْ بُطْنِ اُمِّكُمْ لَتَعْلَمُوْا اَلَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَ عَرْشِ هٖٔ ۚ عَالِمُ الْغُیُّوْبِ ۚ
مَّا مِّنْ نَّجْوٰی لِّمَنْ هٖٔ ۚ اَلَّا يَشْعُرَ ۚ سُبْحٰنَ الَّذِیْ یَعْلَمُ الْسُّرُوْۤسَ ۚ
۝۷۸

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajarandan pendidikan

Al-Ghazali mengatakan: “Dan anak adalah suatu amanat Tuhan kepada kedua orang tuanya, hatinya suci bagaikan juhar yang indah sederhana dan bersih

dari segala goresan dan bentuk. Ia masih menerima segala apa yang digoreskan kepadanya dan cenderung kepada setiap hal yang ditujukan kepadanya". Sejarah pendidikan Islam mencatat adanya keterkaitan antara perkembangan keilmuan dengan institusi Negara, yaitu terkait dengan peran institusi dalam mendesain kebijakan yang berdampak pada relasi antara penguasa dengan masyarakat.

Pendidikan karakter yang dibangun oleh system Negara selalu mengaitkan dengan nilai-nilai ke-Islama-an, baik dalam bentuk formal maupun substansial. Sehingga, relasi antara penanaman nilai-nilai Islam dengan system bernegara berjalan secara simultan dan saling mendukung antara ajaran agama dan system yang mendasari beriddirinya suatu Negara (*nation state*), baik dalam bentuk kekhalifahan, kerajaan, atau demokrasi yang berkembang pada era modern.

4. Formulasi Perencanaan Teknokratik Kebijakan Pendidikan Karakter Nilai Islam Ke-Indonesia-an

Formulasi Perencanaan berhubungan dengan pembuatan desain kebijakan, formulasi dari perencanaan keduanya dapat saling sharing antar kelembagaan. Faktor dikotomi tersebut disebabkan karena perkembangan sejarah dari literatur bukan yang substansi pada istilah tersebut (Robert R. Mayer, 1985:62)

Maka dalam perencanaan kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an perlu dikaitkan dengan kebijakan strategis yang dimulai dari proses formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi strategis dengan melibatkan *stakeholder* dari berbagai unsur dari sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan Islam. Islamy, mendesain tahapan perencanaan secara detail, antara lain adalah: (a) formulasi perumusan masalah, (b) formulasi penyusunan agenda, (c) formulasi perumusan usulan, (d) pengesahan kebijakan, (d) pelaksanaan kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan (Islamy, 2003:21)

a. Perumusan Masalah Pendidikan Karakter Nilai Islam Ke-Indonesia-an

Pemangku kebijakan pendidikan Islam perlu merumuskan pemetaan masalah dengan mengidentifikasi masalah yang berupa pendapat-pendapat atau problem kebutuhan anggota masyarakat, sehingga dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan berbasis karakter tersebut dengan tepat dan benar. Tidak semua permasalahan dalam proses pendidikan akan dipilih untuk diselesaikan. Agar dapat mendesain masalah mana yang akan diselesaikan diperlukan langkah-langkah perumusan masalah adalah: (1) Mengidentifikasikan berbagai masalah yang terkait pendidikan karakter, contoh identifikasi kasus dekadensi moral peserta didik dan produk hukum atau kebijakan, yang merupakan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus diatasi. (2) Memprioritaskan masalah umum.

Masalah umum atau problema publik adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi serta mempunyai akibat yang luas kepada masyarakat. (3) Mengidentifikasi Isu. Isu adalah masalah yang dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap masalah-masalah itu (Islamy, 2003:40)

Urgensi pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an adalah (1) Disorientasi dasar pancasila sebagai filosofi dan ideology pancasila; (2) Lemahnya perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi pancasila; (3) Bergesernya nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) masuknya ideology transnasional dan disintegrasi bangsa, kondisi ini disebabkan arus ideologi ekstrimis Islam fundamentalis.

Berdasarkan kondisi diatas, formulasi kebijakan pendidikan karakter dibuat melalui arah dan sasaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan karakter bangsa di Indonesia pada tahun 2010-2025. Rentang pembangunan karakter tersebut didesain secara bertahap dan keberlanjutan.

Formulasi kebijakan pendidikan karakter dilevel pusat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: perencanaan, implementasi, dan evaluasi hasil. Pendidikan karakter Islam Ke-Indonesia-an harus menyesuaikan dengan menggunakan formulasi dari berbagai sumber, antara lain adalah: (1) filosofi UUD 1945, melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2003 beserta undang-undang turunannya; (2) teoritis; teori tentang psikologi, pendidikan Islam, nilai dan moral serta sosio-kultural.; (3) empiris: pengalaman dan praktik terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan, pesantren dan kelompok kultural (UU Sisdiknas, 2003)

Implementasi kebijakan pendidikan karakter Islam Ke-Indonesia-an dalam konteks kebijakan makro dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia merupakan komitmen seluruh sektor kehidupan, bukan hanya sector pendidikan nasional keterlibatan aktif dari sektor-sektor yang lainnya, khususnya disektor keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, hokum dan Hak Asasi Manusia.

TAP/MPR RI Tahun 2001 No.VI dan VII mengenai visi indonesia masa depan serta etika kehidupan berbangsa perlu dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam pengembangan konsep Pendidikan ke-Indonesia-an yang memiliki nilai-nilai budaya dan multi etnis sesuai karakter bangsa. Hal ini perlu dipertimbangkan menghidupkan kembali pendidikan karakter dan budi pekerti terutama ditingkat pendidikan dasar, melengkapi pendidikan agama yang sudah ditangani dengan dalam kebijakan yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pengajaran Islam ke-Indonesia-an berkaitan dengan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal dan nonformal. Pengajaran agama diatur di dalam kebijakan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa panduan pengajaran agama di dalam undang-undang tersebut harus diberikan kepada semua satuan pendidikan baik secara formal maupun nonformal dari swadaya masyarakat. Bahkan di dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan asing wajib memberikan pelajaran agama dari pengajar yang seagama dengan siswanya (Tilaar, 2004: 233).

Pengajaran agama sebagai suatu proses pembentukan nilai Islam kebangsaan yang bercorak budaya tentunya sejalan dengan pendidikan keagamaan dalam suatu masyarakat berkebangsaan. Keduanya mengenal proses hegemoni nilai-nilai agama di dalam kehidupan harmonis. Apabila pelajaran agama ditekankan kepada bentuk-bentuk yang normatif, prosedural, obyektif dalam pelaksanaan ajaran dan nilai-nilai agama tertentu, maka pendidikan keagamaan sifatnya sangat inklusif bahkan sangat substantif (Tilaar, 2004: 233).

Agar dapat memfungsikan nilai-nilai Islam yang moderat dalam kebijakan nasional yang berdimensi Ke-Indonesia-an, dan merealisasikannya kedalam lembaga-lembaga pendidikan, diperlukan suatu cara yang sistematis, terencana, berdasarkan pendekatan kolaboratif, serta mensintesis pendidikan islam dengan disiplin ilmu, konsep *cross culture* atau konsep paradigma lain. Karena perkembangan masyarakat semakin kompleks dan tentunya akan mengarahkan potensi yang ada pada diri manusia dengan cepat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat dari kompleksitas sosial masyarakat itu sendiri.

Pada tahap evaluasi hasil perencanaan, penilaian program untuk perbaikan berkelanjutan dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi proses aktualisasi pendidikan karakter dalam proses penyerapan dari nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an sebagai indikator bahwa proses institusionalisasi pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an menghasilkan suatu desain formulasi kedalam sistem kebijakan di Negara Indonesia.

b. Penyusunan Agenda

Cobb and Elder mendefinisikan agenda setting sebagai: *"a set of political controversies that will be viewed as falling within the range of legitimate concerns meriting yhe attention of the polity; a set of items scheduled for active and serious attention by decision making body"* (Roger W. E Elder, 1991:45)

Ada dua agenda penyusunan kebijakan, (1) *Agenda sistematis*, diharapkan dapat diselesaikan oleh pemerintah secara terstruktur. (2) *Agenda Official*,

kebijakan yang sudah menjadi hasil oleh pengambil keputusan dan sedang dirumuskan cara pemecahannya.

Pengelolaan agenda tentang isu-isu kebijakan: (1) Isu berasal dari luar pemerintah atau *Outside initiation model*, yang kemudian dikembangkan ke dalam *systemic* agenda dan akhirnya masuk dalam institutional agenda. Dalam tipe ini peran kunci dipegang oleh kelompok sosial. (2) model ini inisiatif berasal dari pemerintah, namun pemerintah meminta dukungan dari masyarakat. Isu masuk dulu ke institutional agenda *Mobilization model*, baru kemudian ke *systemic* agenda. (3) Inisiatif berasal dari pemerintah, dan langsung dimasukkan dalam institutional *Inside initiation model* (M. Howlett, A. Perl and M. Ramesh, 2009: 322)

Isu strategis dalam penyusunan agenda pembangunan pendidikan karakter dikaji dari dimensi internal desain strategis pemerintah dalam hal ini adalah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, ditemukan dalam berbagai kajian, yaitu: (1) Disorder karakter kebangsaan dan belum dihayatinya nilai-nilai pancasilasebagai filosofi dan ideologi kebangsaan. (2) Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi pancasila. (3) Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (4) Ancaman disintegrasi bangsa dari ideology transnasional.

Berdasarkan isu-isu strategis tentang pendidikan karakter diatas, maka penting untuk merumuskan integrasi antara pendidikan Agama dalam konteks internalisasi nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an. Kajian ke-Islam-an perlu dikaji dari aspek aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi relevan dalam merumuskan pembangunan suatu bangsa.

c. Perumusan Usulan Kebijakan (Policy Proposals)

Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam penelitian berupa: (1) Mengidentifikasi alternatif, (2) Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, (3) Menilai alternatif, (1) Memilih alternatif yang memuaskan.

Langkah-langkah yang disampaikan Islamy diatas adalah model rasional komprehensif. Model lainnya adalah inkremental yang ditempuh apabila ada keterbatasan waktu, biaya dan informasi yang dimiliki. Model ini bersifat upaya untuk memodifikasi terhadap program-program yang sudah ada (Abdul Wahab, 2004: 43)

(2) Legitimasi Kebijakan

Usulan dalam legitimasi kebijakan menjadi bagian dari kebijakan yang sah bila sudah diadopsi atau diberi legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang yang biasanya dilakukan oleh pihak legislatif. Rencana pembangunan dapat supaya

mendapatkan kebijakan dalam pelaksanaannya perlu mendapat legitimasi secara hukum dengan mendesai tiga desain kebijakan. Tiga desain kebijakan tersebut adalah: *Desain pembangunan*, perencanaan pembangunan dilakukan pembahasan serta harus disahkan melalui suatu keputusan institusi musyawarah *stakeholder*, penyusunannya akan dilakukan oleh lembaga pemerintahan. *Desain Kebijakan*, perencanaan pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah *ansich*. *Desain Program*, garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah. Sedangkan pedoman perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas, ada lima tahapan yaitu: (a) penyusunan kebijakan (b) penyusunan program (c) penyusunan pembiayaan (d) pemantauan dan evaluasi kinerja (e) penyempurnaan program. Untuk langkah (d) dan (e) bukan merupakan tahapan perencanaan (Tjokroamidjojo, 1996:98)

Selengkapnya proses penyusunan perencanaan pembangunan, yaitu:

Pertama; Penyusunan Kebijakan, Penyusunan proses kebijakan meliputi tahapan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur: (a) Tinjauan keadaan, (b) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, (c) Penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, (d) Identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan, (e) Persetujuan rencana. *Kedua*; Penyusunan Program, tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk mengimplementasikan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan ke dalam berbagai program dengan menetapkan: tujuan program, sasaran program, kegiatan dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan. Perumusan program dan kegiatan disebut pemrograman yaitu suatu rencana tahunan yang berisi langkah-langkah strategik (kegiatan) yang dipilih untuk mewujudkan tujuan strategik yang tergambar dalam sasaran beserta taksiran sumberdaya (SDM, biaya, peralatan) yang diperlukan untuk itu. Karena program berisi kegiatan sehingga program dapat diartikan sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. (4) Penyusunan Pembiayaan dan Anggaran, proses penyusunan dan pembiayaan, direncanakan sumber pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi atau tugas pembantuan. Asas efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas pembiayaan, sehingga perlu didukung dengan standar-standar harga satuan pokok untuk komponen-komponen pembiayaan.

Penyusunan pembiayaan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Badrul Munir, 2002:76)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari empat tahapan yakni: *pertama*, Penyusunan Rencana; *kedua*, Penetapan Rencana *ketiga*, Pengendalian; *keempat*, Evaluasi. Dari tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara komprehensif akan mendesain pola system perencanaan yang sistematis.. Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan rencana yang penting untuk ditetapkan antara lain terdiri dari empat langkah, yaitu: *Langkah pertama* adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. *Langkah kedua*, masing- masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. *Langkah ketiga* adalah melibatkan komponen-komponen masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang sistem pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan *Langkah keempat*, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kebijakan

Proses dalam mengendalikan evaluasi pelaksanaan strategis pembangunan adalah untuk menjamin tercapainya dalam tujuan strategis dan memberikan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan pendidikan. Selanjutnya, Kepala satuan perangkat daerah dalam menghimpun dan menganalisis pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing pimpinan satuan pendidikan dengan tugas dan kewenangannya berhubungan dengan supervise pendidikan Islam.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan karakter Islam ke-Indonesia-an adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan kebangsaan yang secara komprehensif dan sistematis dalam menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan pendidikan kebangsaan.. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan karakter. Indikator dan sasaran mencakup *input*, *proses* *output*, *result*, manfaat dan *impact*. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi, satuan pendidikan harus mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah ditemukan proses integrasi tentang konsep Islam Ke-Indonesia-an dalam konsep dan formulasi perencanaan teknokratik kebijakan pendidikan karakter nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an, melalui desain kebijakan yang dimulai dengan analisis konteks makro dan mikro pendidikan karakter, integrasi nilai-nilai Islam dengan kerangka visi misi dan tahapan prioritas pembangunan karakter bangsa, pilihan sasaran dan pengendalian strategi nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an dalam struktur wilayah dan kurikulum satuan pendidikan Islam.

Pada tahapan formulasi kebijakan pendidikan karakter Islam Ke-Indonesia-an secara nasional dibagi dalam tiga tahap, yaitu: perencanaan komprehensif, pelaksanaan multidimensional, dan evaluasi hasil secara berkelanjutan dan menyeluruh. Pendidikan karakter Islam Ke-Indonesia-an penting menyesuaikan dengan menggunakan formulasi dari berbagai sumber, antara lain adalah: (1) filosofi pancasila, UUD 1945, dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional diikuti oleh undang-undang turunannya sampai ke peraturan daerah; (2) teoritis; teori tentang sosiologi, pendidikan karakter dan Islam, nilai dan moral serta nilai budaya lokal.; (3) pengalaman secara empiris dan *best practice*, antara lain tokoh-tokoh pendidikan, satuan pendidikan, pesantren dan kelompok kultural.

Pada tahapan Implementasi kebijakan pendidikan karakter secara makro nilai-nilai Islam Ke-Indonesia-an dalam kehidupan masyarakat beragama di Indonesia dan merupakan bentuk kesepakatan seluruh stakeholder, bukan hanya bidang pendidikan Islam di level nasional, keterlibatan aktif dari sektor-sektor publik lainnya yang penting untuk dikolaborasikan, khususnya pada dimensi keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tahap evaluasi hasil perencanaan, penilaian program pendidikan karakter Islam Ke-Indonesia-an selanjutnya sebagai penerapan system yang dirancang secara berjenjang dan diimplementasikan untuk melihat proses pendidikan karakter dalam proses penyerapan dari nilai-nilai Islam ke-Indonesia-an sebagai indikator bahwa proses institusionalisasi pendidikan karakter nilai Islam Ke-Indonesia-an menghasilkan suatu desain formulasi kedalam sistem kebijakan teknokratik dalam system birokrasi dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Azyumardi Azra. 2001. *Pendidikan Agama : Membangun Multikulturalisme Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bogdan, B. &. 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc
- Hamzah B. Uno. 2006. *Perencanaan pemberian pembelajaran*. Jakarta: Aksara.
- James Friedmann. 1987 *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton, NJ: Princeton University Press .
- Mayer, Robert R. 1985. *Policy and program planning*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall
- Patsy Healey. 1997. *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan.
- Yakin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural; Cross-Kultur Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media
- Tilaar. 2004. *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta: Buku Obor
- Nigel Taylor. 1998. *Urban planning theory since 1945*. Gateshead: Sage Publications
- Abudin Nata. 1996. *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo,
- M. Howlett, A. Perl and M. Ramesh. 2009. *Studying Public Policy* (Toronto: Oxford University Press
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Evaluasi kebijakan publik. Author, Samodra Wibawa. Publisher, PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Tjokroamidjojo, B. 1996, *Perencanaan Pembangunan*, Edisi ke -19, PT Gunung. Agung , Jakarta.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif. Otonomi Daaerah*. Mataram: Bappeda Provinsi NTB
- Uphoff, N. T. 1986. *Local institutional development: an analytical sourcebook with cases. Local institutional development: an analytical sourcebook with cases*. Kumarian Press. <https://doi.org>
- Zain, H. 2013. *Pengembangan pendidikan Islam Multikultural berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jurnal: Volume 8 Nomor 1 Juni 2017. *Tadrîs*.